



PRESS RELEASE

Pemetaan Kerawanan Pemilu di Kabupaten Penajam Paser Utara Pada Pemilihan Tahun 2024



Penajam, 25 Juli 2024 - Dalam rangka menjaga integritas dan transparansi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Penajam Paser Utara menyusun Pemetaan Kerawanan Pemilu yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan merumuskan langkah-langkah strategis pencegahan yang akan dilakukan Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara bersama para mitra strategis.

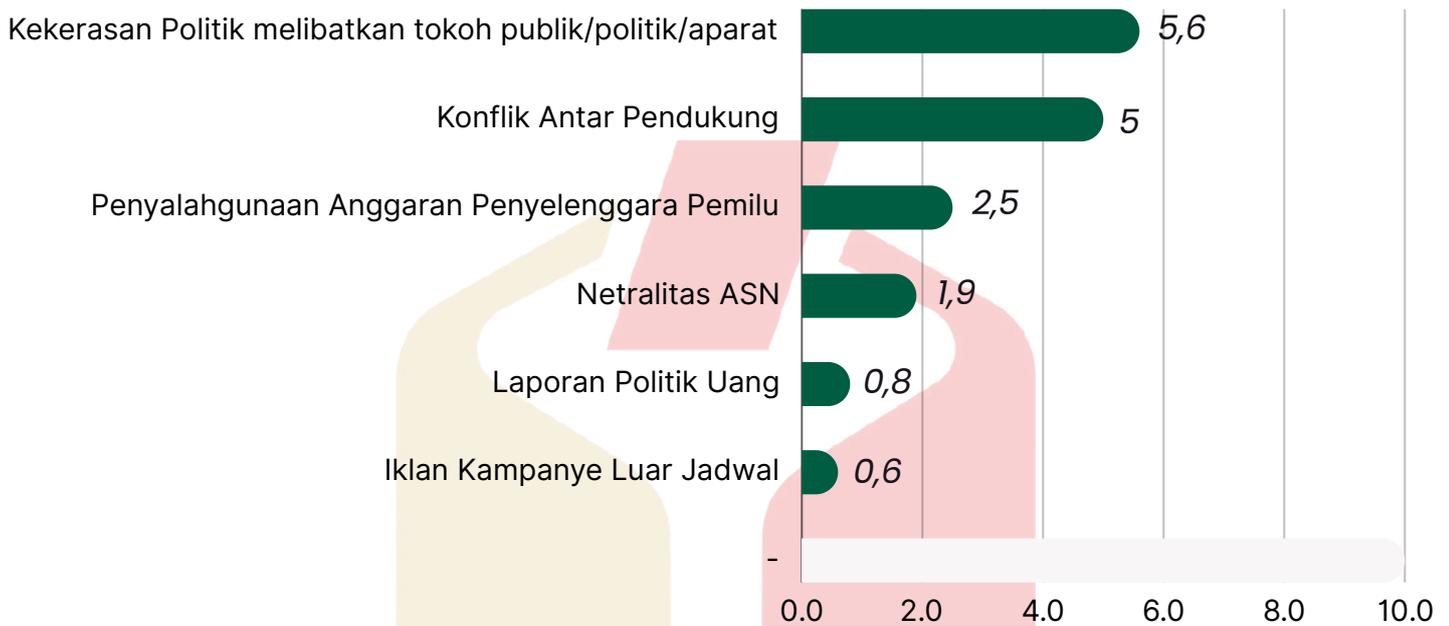
Pemetaan Kerawanan Pilkada 2024 menjadi penting agar dapat memberi gambaran secara utuh berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan proses pilkada yang aman, adil, dan bebas dari kecurangan. Pemetaan kerawanan merupakan proses penting dalam menjaga integritas dan keamanan proses pemilihan sehingga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dapat terjaga. Potensi kerawanan dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Penajam Paser Utara harus diantisipasi dengan baik melalui pengawasan, edukasi, dan koordinasi yang efektif.

Pemetaan kerawanan Pilkada 2024 ini merupakan turunan dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang telah disusun oleh Bawaslu RI. Pemetaan kerawanan Pilkada mencoba menerjemahkan secara lebih rigid terkait potensi kerawanan pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang telah tergambar pada IKP yang telah disusun sebelumnya.



Indeks Kerawanan Pemilu

Hasil IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 merekam tingkat kerawanan Kabupaten/Kota. Khusus untuk tingkat Kab/Kota di Kalimantan Timur, dari 10 Kab/Kota yang ada di Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara. Dalam identifikasi isu dan tahapan yang rawan dari skala prioritas sebagai berikut:



Dimensi Sosial dan Politik

Dimensi sosial dan politik terdiri dari sub dimensi keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, dan otoritas penyelenggara negara. Pada dimensi sosial politik, isu netralitas ASN/TNI/Polri menjadi faktor kerawanan utama. Terkait kerawanan Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri dapat berkorelasi dengan isu calon petahana yang kembali mencalonkan diri pada Pilkada 2024 di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pasangan calon petahana (incumbent) memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya negara, yang dapat digunakan untuk keuntungan pribadi dalam kampanye mereka. Hal ini termasuk penggunaan fasilitas pemerintah, anggaran daerah, serta mobilisasi ASN.



Dimensi Sosial Politik	
Subdimensi	Potensi Kerawanan
Otoritas Penyelenggara Negara	Netralitas ASN/TNI/Polri
	Adanya Pelanggaran Kode Etik ASN
Keamanan	Adanya konflik antar pendukung peserta/paslon
	Kekerasan politik yang melibatkan tokoh publik/politik/aparat keamanan
Otoritas Penyelenggara Pemilu	Adanya Pelanggaran Administrasi

Tabel 1. Potensi Kerawanan Dimensi Sosial Politik

● **Subdimensi Penyelenggaraan Negara**

Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 001/RekomDPPL/LP/PL/Kab/23.10/1/2024 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lain dan selanjutnya diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

● **Subdimensi Keamanan**

Adanya Alat Peraga Kampanye yang rusak disejumlah tempat yang berdampak pada peserta pemilu sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh peserta pemilu berupa pemasangan ulang Alat Peraga Kampanye tersebut.



Dimensi Penyelenggaraan Pemilu dan Dimensi Kontestasi

Dimensi penyelenggaraan pemilu berfokus pada keberhasilan penyelenggara pemilu untuk menyajikan pelaksanaan Pemilu/Pilkada yang adil dan berintegritas. Permasalahan paling mendasar terkait kerawanan adalah ketidaksesuaian prosedur dan mekanisme pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang disebabkan kurangnya profesionalitas penyelenggara pemilu. Hal ini berpotensi pada terjadinya pelaksanaan pemungutan suara ulang, pemungutan suara susulan, dan penghitungan suara ulang.

Dimensi kontestasi berfokus pada dua hal yaitu kebebasan hak untuk dipilih dan pelaksanaan kampanye calon untuk dapat menarik perhatian pendukung pada proses pemilu/Pilkada. Praktik politik uang merupakan salah satu bentuk kecurangan yang sering terjadi dalam pelaksanaan kampanye

Dimensi Penyelenggaraan Pemilu dan Dimensi Kontestasi		
Subdimensi	Potensi Kerawanan	Keterangan
Ajudikasi dan Keberatan	Adanya Sengketa Hasil Pemilu	Terdapat Perselisihan Hasil Antara Partai Demokrat dan Amanat Nasional pada Pemilihan DPR
Pelaksanaan Kampanye	Alat Peraga Kampanye rusak	Terdapat Pengrusakan Alat Peraga Kampanye di sejumlah tempat
	Adanya iklan kampanye di luar jadwal	Terjadi pelanggaran kampanye di media yang dilakukan diluar jadwal tahapan kampanye

Tabel 2. Potensi Kerawanan Penyelenggaraan Pemilu dan Dimensi Kontestasi

● Subdimensi Adjudikasi dan Keberatan

Adanya sengketa hasil Pemilu terdapat perselisihan Hasil Antara Partai Demokrat dan Amanat Nasional pada Pemilihan DPR yang terjadi di dua (2) TPS yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara yakni, TPS 15 Kelurahan Waru dan TPS 26 Kelurahan Petung.



Analisis Isu Strategis

Merujuk hasil temuan dan riset dari hasil Pemetaan Potensi Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 ini, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Penajam Paser Utara mencatat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama, terutama oleh penyelenggara Pilkada sebagai upaya membawa proses pelaksanaan Pilkada 2024 yang lebih terbuka, jujur, dan adil.

- **Netralitas ASN dan potensi penyelewengan penggunaan fasilitas negara calon petahana pada saat pelaksanaan Pilkada**

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian utama. Adanya calon petahana yang mencalonkan kembali pada Pilkada, terdapat potensi penyelewengan penggunaan fasilitas negara oleh calon petahana dan ASN yang dapat menguntungkan pihak tertentu. Diperlukan pengawasan ketat agar ASN tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis selama Pilkada.

- **Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Proses pemungutan dan penghitungan suara harus berjalan transparan dan akuntabel. Segala bentuk kecurangan harus diantisipasi dan ditindak tegas. Keterbukaan dalam setiap tahapan pemilihan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik.

- **Pelanggaran Kampanye dan Politik Uang**

Pelanggaran kampanye, seperti kampanye tidak berizin dan praktik politik uang, menjadi ancaman serius dalam Pilkada 2024. Pendeknya masa kampanye dapat meningkatkan tekanan pada kandidat untuk menggunakan cara-cara instan, termasuk politik uang, untuk mendapatkan dukungan suara. Praktik politik uang merusak integritas pemilu dan mengurangi partisipasi politik yang sehat.

- **Profesionalitas penyelenggara pemilu dan keterbukaan informasi KPU**

Profesionalitas penyelenggara pemilu, termasuk KPU, sangat penting untuk menjaga integritas pemilu. Keterbukaan informasi dan transparansi dari KPU dalam semua tahapan pemilu akan meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa proses pilkada berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Salah satu isu krusial yang dihadapi Bawaslu adalah keterbatasan akses informasi yang dimiliki Bawaslu terhadap sistem informasi yang dimiliki oleh KPU mulai dari SILON hingga SIPOL.

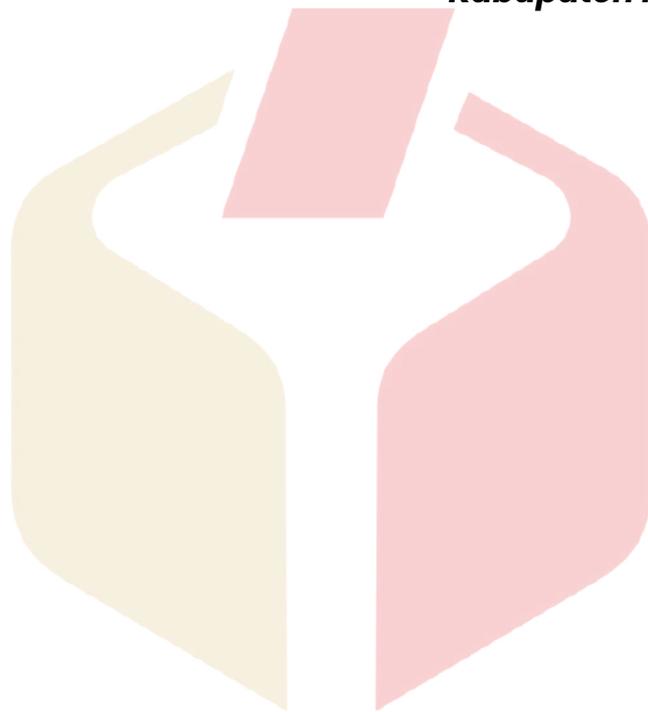


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Date Release:
27/07/2024

Dalam menghadapi berbagai isu ini dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, media dan masyarakat. Semua pihak harus berkomitmen untuk menjaga integritas dan kelancaran Pilkada 2024 di Kabupaten Penajam Paser Utara demi terwujudnya pesta demokrasi yang adil dan berintegritas.

Moh. Khazin, S. H
Ketua Bawaslu
Kabupaten Penajam Paser Utara



Untuk Informasi lebih lanjut :

*Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara
Jalan Provinsi Kilometer 8, Kelurahan Nipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 76141
E-mail : bawasluppu@gmail.com*